

# SKENARIO KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI LUMBUNG ENERGI NASIONAL

Heri Apriyanto

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT, Jakarta

## Abstract

*The local government of South Sumatera Province and their people have desire to become a National Energy Stock (Lumbung Energi Nasional) is realistic. It is supported by the huge potential of energy resources and many kinds of nonrenewable energy (fossil) and renewable energy (nonfossil). Strategic position and basic infrastructure in this region support this plan. To realize this plan is needed direction and policy scenario as a reference in formulating the regional development program in order to support the realization of National Energy Stock. Based on the analysis of the existing strengths and opportunities, seven policies can be formulated to realize the National Energy Stock.*

**Kata kunci** : Lumbung energi nasional, Provinsi Sumatera Selatan, skenario kebijakan

## 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan butir-butir kebijakan utama dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2005, yaitu penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri dan pengoptimalan produksi energi, maka Provinsi Sumatera Selatan dengan potensi sumberdaya energi yang melimpah dan posisi wilayah yang strategis diharapkan mampu menjadi lokomotif penyedia energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional (terutama Pulau Jawa) maupun permintaan energi oleh negara-negara ASEAN (terutama Malaysia dan Singapura).

Seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pertambahan penduduk, maka kebutuhan akan energi semakin meningkat pula. Bahkan, selama periode 1991-2005, laju pertumbuhan pemakaian energi final di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yakni rata-rata 6,38% berbanding 4,89% per tahun (Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2006). Karena itu, ketersediaan energi secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional.

Untuk menjadi lumbung energi nasional, Provinsi Sumatera Selatan memiliki empat faktor kunci. Pertama, potensi sumberdaya energi yang dipunyai provinsi ini terdiri dari energi tidak terbarukan (fosil) seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, *coal bed methane* (CBM) dan energi terbarukan (nonfosil) seperti panas bumi, surya, air (mikrohidro), biomasa, dan gambut. Kedua, letak

geografis Provinsi Sumatera Selatan sangat strategis karena berdekatan dengan wilayah kerja sama regional IMS-GT (*Indonesia–Malaysia–Singapore Growth Triangle*) dan IMT-GT (*Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle*). Ketiga, memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalur kereta api, bandara internasional, dua poros jalan utama (pergerakan lintas Pulau Sumatera), dan rencana pembangunan pelabuhan laut internasional. Keempat, besarnya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat, yang ada di wilayah ini. Dukungan dari pemerintah pusat disampaikan oleh Presiden RI pada saat meresmikan PLTGU Borang tanggal 9 November 2004 dan ditegaskan lagi melalui Pidato Presiden RI tanggal 17 November 2004.

Untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional, maka perlu disusun skenario kebijakan pengembangannya. Kebijakan tersebut nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merumuskan strategi dan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya Lumbung Energi Nasional. Makalah ini berupaya menyajikan skenario kebijakan pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional. Skenario ini disusun berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki oleh wilayah ini terkait dengan sumberdaya energi dan aspek kewilayahan yang dimiliki.

## 2. BAHAN DAN METODE

### 2.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan

Hingga tahun 2006 lalu, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota, dengan luas wilayah sebesar 87.014,42 km<sup>2</sup>. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 102° - 106° BT dan 1° - 4° LS. Sedangkan secara administratif berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Provinsi Lampung di sebelah selatan, Provinsi Bengkulu di sebelah barat, serta Selat Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2005).

Provinsi ini mempunyai iklim tropis dan basah. Secara hidrologis merupakan daerah kaya sumberdaya air, karena dialiri oleh banyak sungai besar, seperti Musi, Ogan, Komering, dan Lematang. Kebanyakan sungai bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Mesuji, Lalang, dan Banyuasin. Berdasarkan topografinya, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah, pantai, dan pesisir. Daerah pegunungan/dataran tinggi merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan yang membelah Sumatera Selatan.

Berdasarkan tatanan tektoniknya (*tectonic setting*), Provinsi Sumatera Selatan menempati mendala cekungan belakang busur Paleogen (*Paleogene back-arc basin*) yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan (*South Sumatera basin*) di bagian timur, dan mendala busur vulkanik (*volcanic arc*) yang membentang secara regional di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong (*oblique*) antara lempeng Samudera India di barat daya dan lempeng benua Eurasia di timur laut pada Tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda (*Sunda trench*) yang berada di lepas pantai barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring ~30° di bawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda atau *Sundaland*.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2005), maka jenis penggunaan lahan pada tahun 2005 sebagian besar masih didominasi oleh hutan (30,27%), baik hutan rakyat maupun hutan negara, perkebunan (27,19%), serta pemukiman (4,41%). Di bidang kependudukan, pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan selama rentang waktu 2003-2005 adalah sebesar 1,31% per tahun, dengan kepadatan 78 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun jumlah

penduduk pada tahun 2005 telah mencapai 6.755.900 jiwa.

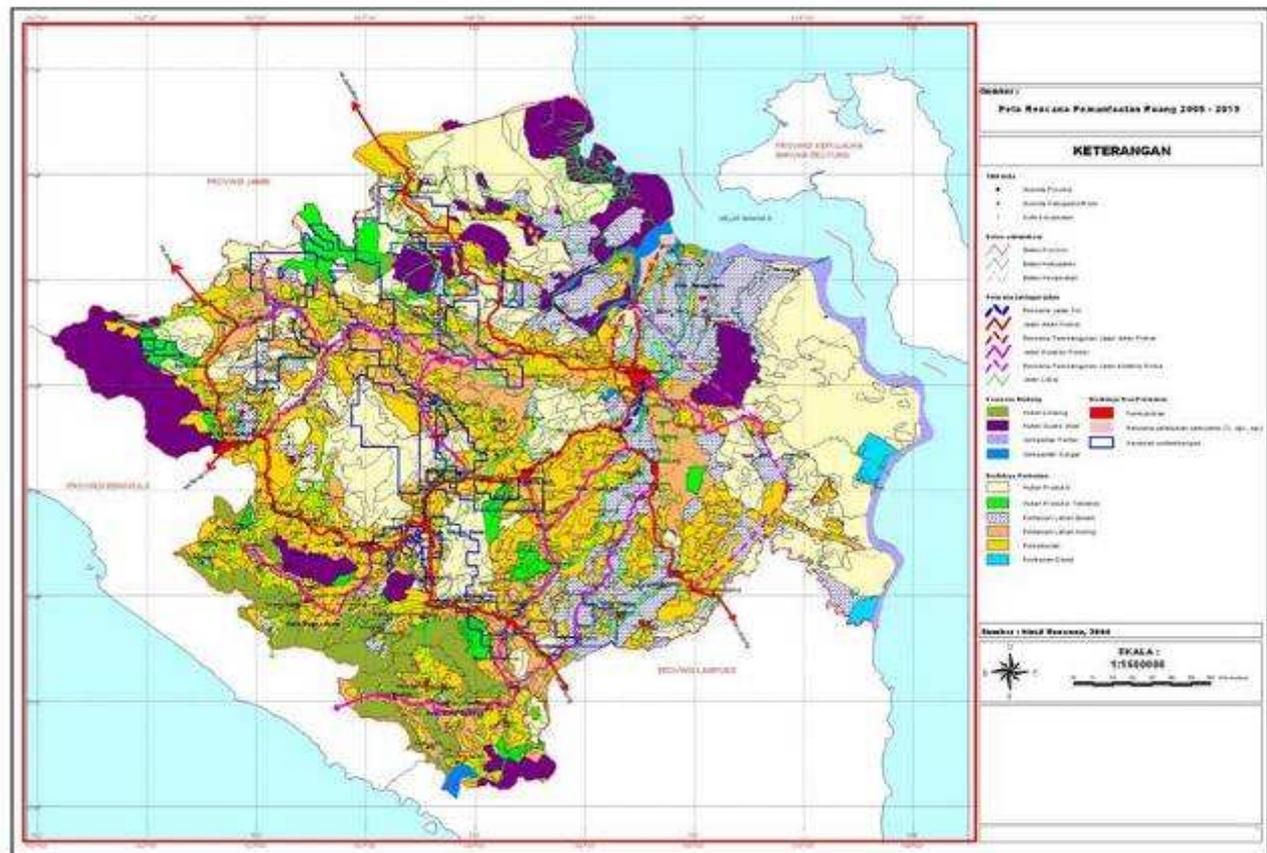
### 2.2. Sistem Kota dan Infrastruktur

Berdasarkan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006), Provinsi Sumatera Selatan memiliki satu kota yang berperan dan berfungsi sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional), yaitu Kota Palembang. Dengan demikian, wilayah ini memiliki kedudukan yang strategis dalam kerangka sistem perkotaan nasional. Adapun rencana pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Pola pergerakan transportasi di Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pergerakan eksternal dan internal. Pergerakan eksternal, yaitu pergerakan yang berasal dari atau menuju ke luar wilayah Sumatera Selatan. Pada sistem transportasi darat, Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua poros jalan utama yang melayani pergerakan regional lintas provinsi, yakni lintas tengah dan lintas timur Sumatera. Sedangkan transportasi kereta api bergerak dari Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang menuju Tanjung Karang, dan sebaliknya. Untuk transportasi udara, Provinsi Sumatera Selatan memiliki Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang menjangkau jalur penerbangan ke dan dari Jakarta, Sumatera Barat, Batam, Malaysia, dan Singapura. Untuk pergerakan yang menggunakan transportasi laut, dapat diakses dari Pelabuhan Boom Baru Palembang. Sementara itu, pergerakan internal, yaitu pergerakan yang terjadi di dalam wilayah Sumatera Selatan, tepatnya pergerakan antarkabupaten/kota di provinsi ini. Pergerakan internal untuk menunjang mobilitas orang dan barang dilayani oleh transportasi jalan raya, jalan kereta api, dan transportasi sungai.

### 2.3. Sumberdaya Energi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sumberdaya energi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan cukup melimpah dan beraneka ragam, baik energi tidak terbarukan maupun yang terbarukan. Sebagian sumberdaya energi tersebut sudah dieksplorasi dan dieksploitasi. Di antaranya batubara, minyak bumi, dan gas alam. Tabel 1 menunjukkan besarnya potensi sumberdaya energi yang dimiliki wilayah ini.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2006, *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 -2016*.

**Gambar 1.** Rencana Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019

**Tabel 1.** Sumberdaya Energi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Energi	Satuan	Nasional		Sumatera Selatan
Minyak bumi	Miliar Barell	86,26		0,76
Gas alam	TSCF	384,70		24,18
Batubara	Miliar Ton	57,85		22,24
CBM	TSCF	337,00		120,00
Tenaga Air	GW	75,67		1,64
Panas Bumi	GW	27,15		1,91
Mini/Mikrohidro	MW	458,75		
Biomassa	GW	49,81		12,23

Sumber : Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Universitas Sriwijaya, 2005-2006.

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka potensi sumberdaya energi di Provinsi Sumatera Selatan sangat besar terutama minyak bumi dan gas alam (migas), batubara, panas bumi, dan CBM. Tabel 2 secara khusus memperlihatkan besarnya cadangan migas dan batubara di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 2.** Cadangan Migas (2005) dan Batubara (2004) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan

Jenis	Satuan	Nasional		Sumatera Selatan		
		P1	P2	P1	P2	P3
Minyak	MMSTB	4.187	4.439	448	122,5	186,9
Gas	TSCF	97,26	88,54	10,23	4,82	9,12
Batubara*)	Juta ton	6.981,6		2.653,9		

Sumber : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Universitas Sriwijaya, 2005-2006.

Catatan : \*) siap tambang; P1 : terbukti, P2 : mungkin, P3 : harapan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menyusun skenario kebijakan pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional, maka konsep yang digunakan adalah bahwa Provinsi Sumatera Selatan berperan menjadi penyedia dan pemasok energi melalui peningkatan nilai tambah energi primer menjadi energi final (listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, batubara, briket batubara, dan konversi batubara lainnya) untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, ekspor

energi primer dan sekunder, dan secara keseluruhan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Universitas Sriwijaya, 2005-2006).

Sedangkan metode analisis yang digunakan untuk menyusun skenario kebijakan pengembangan tersebut adalah Analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peluang dan ancaman (analisis lingkungan eksternal) dan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan (analisis lingkungan internal) (Rangkuti, Freddy, 1997). Analisis untuk penentuan skenario ini terbagi menjadi empat komponen dasar, yaitu :

- Kekuatan (**S**trength), merupakan faktor-faktor internal yang bisa dijadikan kunci sukses pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional.
- Kelemahan (**W**eakness), yakni faktor-faktor internal yang bisa menjadi sumber ketidakberhasilan pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional.
- Peluang (**O**pportunity), adalah kondisi eksternal (lingkungan strategis) yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional jika bisa dimanfaatkan dengan baik.
- Ancaman (**T**hreat), yakni kondisi eksternal (lingkungan strategis) yang dapat memberikan dampak negatif bagi pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional jika tidak diantisipasi dengan baik.

Dengan mengacu pada matriks hubungan antara kekuatan dan peluang (S-O) serta kelemahan dan ancaman (W-T), maka langkah-langkah strategis untuk mengembangkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional dapat dirumuskan berdasarkan strategi berikut :

- Strategi S-O

Strategi yang dirumuskan di sini pada prinsipnya didasarkan pada faktor internal yang mendukung pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional dan faktor eksternal yang memberikan peluang bagi upaya pengembangan itu sendiri.

- Strategi W-T

Perumusan strategi W-T difokuskan pada upaya mereduksi faktor internal yang menghambat (kelemahan) dan dibarengi dengan mengantisipasi faktor eksternal yang mengancam pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional.

- Strategi S-T

Dalam merumuskan strategi S-T, faktor internal yang mendukung upaya pengembangan lumbung energi nasional akan dimantapkan, sedangkan faktor eksternal yang bersifat ancaman akan diperkecil.

- Strategi W-O

Perumusan strategi ini mengedepankan upaya meminimalkan kelemahan yang dibarengi langkah-langkah pemanfaatan peluang secara baik untuk memperkuat potensi yang ada.

Untuk menentukan skenario kebijakan, maka aspek kajian terdiri dari aspek pengembangan wilayah dan aspek sumberdaya energi sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Aspek-aspek yang Dianalisis

Aspek Pengembangan Wilayah	Aspek Sumberdaya Energi
1. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Sumberdaya energi
2. Tata Ruang (Spasial)	2. <i>Energy Supply</i> (migas, batubara, panas bumi, gambut, tenaga surya, biomassa, air, lainnya)
3. Infrastruktur (ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan pipa, lainnya)	3. <i>Energy Demand</i> (migas, batubara, panas bumi, gambut, tenaga surya, biomassa, air, lainnya)
4. Sistem transportasi (jalan raya, kereta api, sungai, laut, dan udara)	4. Kelembagaan dan Regulasi
5. Perekonomian wilayah	
6. Sumberdaya manusia	

Dengan menganalisis kondisi Provinsi Sumatera Selatan dari aspek pengembangan wilayah dan sumberdaya energi yang ada pada saat ini dan proyeksi ke depan, maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan pengembangan kebijakan wilayah ini sebagai lumbung energi nasional. Hasil analisis tersebut dapat diuraikan secara singkat di bawah ini :

1. Kekuatan (S) :

- Potensi sumberdaya energi tak terbarukan dan terbarukan sangat besar, terutama batubara, gas bumi, biomasa, dan panas bumi, cadangan terbuktinya sebagian besar sudah diketahui.

- Potensi sumberdaya air cukup mendukung untuk pembangkitan listrik.
- Memiliki pengalaman dalam eksploitasi dan pengolahan serta tersedianya infrastruktur (kilang, sistem distribusi, fasilitas eksploitasi).
- Posisi geografis cukup strategis.
- Ketersediaan lahan untuk program lumbung energi nasional.
- Tersedia jaringan transportasi, baik darat, laut, maupun udara.

## 2. Kelemahan (W) :

- Tidak semua sumberdaya energi bisa dieksploitasi secara ekonomis karena kualitas dan kuantitasnya beragam.
- Infrastruktur eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi belum memadai.
- Produksi minyak bumi dan gas alam mulai menurun.
- Keterbatasan ketersediaan teknologi untuk sumberdaya energi tertentu.
- Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang energi belum ada.
- Kualitas SDM relatif masih rendah.
- Kebijakan dan koordinasi program lumbung energi nasional masih lemah.
- Tingginya sedimentasi di alur-alur sungai dan belum tersendatnya pembangunan pelabuhan laut.

## 3. Peluang (O) :

- Menarik investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi dan infrastruktur.
- Dibangunnya jalur pipa gas Sumatra-Jawa dan Singapura untuk kepentingan nasional dan ekspor.
- Sistem ketenagalistrikan Sumatra-Jawa dan peluang ekspor ke Malaysia dan Singapura.
- Energi terbarukan dapat dikembangkan untuk energi listrik alternatif di daerah terpencil.
- Pasar strategis untuk produk energi
- Pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru.
- Peningkatan koordinasi pengelolaan energi di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, dan ASEAN.
- Rencana kerja sama ekonomi subregional.
- Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional didukung oleh pemerintah pusat.

## 4. Ancaman (T) :

- Persaingan antardaerah, antarsektor/ subsektor, dan antarkomoditas.

- Kontrak jangka panjang ekspor batubara menyebabkan kepentingan pasokan nasional terkurangi.
- Iklim investasi kurang mendukung.
- Globalisasi, terutama terkait dengan *ASEAN Free Trade Area*, *Trans ASEAN Gas Pipeline*, dan *ASEAN Power Grid*.
- Degradasi/penurunan fungsi lingkungan.
- Konflik pemanfaatan lahan.
- Persaingan tenaga kerja terampil yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disusun beberapa strategi untuk mengembangkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional seperti berikut :

### 1. Strategi S-O :

- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi melalui promosi dan pemberian insentif (kemudahan perizinan dan birokrasi), guna menarik investor di bidang eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya energi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mempersiapkan basis data yang akurat dan transparan serta membentuk *Energy Center* sebagai wadah promosi, konsultasi, dan pelayanan perizinan terpadu yang berisikan perwakilan dari setiap instansi dan daerah terkait.
- Menyusun optimasi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi secara komprehensif, baik secara parsial maupun lintas sektor. Koordinasi antarinstansi, antarsektor, dan antardaerah harus terus dikembangkan.
- Melakukan sinkronisasi sistem ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan Sumatra-Jawa dan ekspor ke Malaysia dan Singapura, dengan cara memberikan wewenang kepada Gubernur untuk berkoordinasi dengan berbagai *stakeholders* terkait.
- Memanfaatkan batubara kualitas tinggi dan yang dapat ditingkatkan kualitasnya untuk ekspor, sedangkan batubara kualitas rendah dimanfaatkan untuk PLTU mulut tambang, pembuatan briket, batubara cair, *upgrading brown coal* (UBC), dan gasifikasi batubara.
- Memanfaatkan sumberdaya energi terbarukan untuk memperkuat pasokan energi setempat, dengan cara memperbanyak PLTS dan PLTMH berbiaya murah, mengolah limbah sapi, kerbau, babi untuk biogas, dan mengolah limbah *crude palm oil* (CPO) *off grade* menjadi biodiesel.

## 2. Strategi W-T :

- Sinkronisasi prioritas pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi secara nasional dan regional, yakni dengan cara memberikan wewenang kepada Gubernur untuk menyusun peta prioritas dan berkoordinasi dengan bupati/walikota, menteri, dan *stakeholders* terkait.
- Menyusun prioritas pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi untuk dijadikan unggulan setiap kabupaten/kota agar tidak terjadi persaingan antardaerah. Minyak bumi di Musi Banyuasin. Gas alam mulanya di Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas, kemudian di Banyuasin, Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Prabumulih. Batubara di Muara Enim dan Musi Rawas. *Coal bed methane* di Prabumulih dan Musi Banyuasin.
- Membuat program standar operasi untuk pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya energi dengan cara membuat *Balanced Score Card* manajemen operasional dan strategi energi.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengantisipasi persaingan tenaga kerja terampil dari luar daerah, misalnya melalui penyelenggaraan program diploma bidang energi.

## 4. Strategi S-T :

- Sinkronisasi perencanaan antarwilayah (regional, nasional, internasional) dan antarsektor untuk mencegah ketidakefektifan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi. Misalnya dengan cara mensosialisasikan secara timbal balik semua kebijakan, baik kebijakan kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
- Menerapkan DMO (*domestic market obligation*) untuk pengaturan pemasaran sumberdaya energi secara maksimal demi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terutama batubara yang menjadi primadona sumberdaya energi di Provinsi Sumatera Selatan.
- Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi di bidang sumberdaya energi melalui ketegasan regulasi dan pengembangan kebijakan fiskal dan moneter.
- Menguasai dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan pascatambang untuk meminimalkan degradasi lingkungan.
- Mensinkronisasikan rencana pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota).

- Menjalinkan kerja sama antardaerah dan antarsektor dalam suatu wadah yang efektif dan efisien menjalankan program lumbung energi nasional.

## 4. Strategi W-O :

- Meningkatkan penguasaan teknologi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi sumberdaya energi, terutama teknologi pencairan batubara, *coal bed methane*, dan PLTMH. Sedangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas minyak bumi dapat digunakan EOR (*enhanced oil recovery*). Untuk panas bumi dapat diaplikasikan teknologi yang telah ada, meskipun perlu dimodifikasi.
- Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi, terutama transportasi darat dan sungai.
- Menyusun peta prioritas pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi melalui koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki potensi sumberdaya energi agar pengembangan sumberdaya energi dapat berkelanjutan dan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Menyiapkan sumberdaya manusia untuk kegiatan industri energi dengan cara memetakan kualifikasi kebutuhan sumberdaya manusia di setiap industri energi, sehingga tidak terjadi salah rekrutmen.
- Memperkuat dan mengintensifkan koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam pelaksanaan program lumbung energi nasional, dimana Gubernur Sumatera Selatan bertindak sebagai koordinator.
- Monitoring pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk mengatasi sedimentasi alur sungai dan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mencegah pencemaran di DAS. Sungai di Provinsi Sumatera Selatan memegang peran penting sebagai prasarana transportasi, termasuk produk energi.
- Menyusun sistem evaluasi, indikator kinerja, dan SPM di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi untuk setiap instansi terkait.

### 3.1. Tujuh Skenario Kebijakan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Energi Nasional

Skenario kebijakan pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional disusun berdasarkan hasil analisis SWOT di atas. Skenario ini mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006) dan *Blueprint* Pengelolaan Energi

Nasional (PEN) yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan energi pada level nasional tersebut kemudian diturunkan ke kebijakan energi level Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan energi daerah inilah yang secara langsung akan menjadi acuan dalam penentuan skenario kebijakan pengembangan berbagai aspek/program prioritas yang dihasilkan dari analisis SWOT.

Berikut ini akan diuraikan tujuh skenario kebijakan pengembangan yang perlu ditempuh untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional :

1. Skenario 1. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi

Kebijakan pengembangan sumberdaya energi secara menyeluruh/komprehensif. Upaya yang dilakukan adalah memetakan sumberdaya energi yang ada dan menyusun prioritas pengembangannya berdasarkan besarnya potensi, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur, serta kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

2. Skenario 2. Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya energi yang optimal

Skenario ini meliputi aspek manajerial dan aspek teknis. Aspek manajerial, mengingat perannya sebagai pemasok energi yang berskala nasional, yang berarti melibatkan berbagai daerah lain yang terkait dan berbagai sektor, maka untuk lebih mengoptimalkan, baik dalam operasional maupun dari sisi ekonominya, maka perlu pengembangan kerja sama ekonomi subregional melalui pemanfaatan sistem jaringan transportasi regional. Sedangkan aspek teknis, mengingat jenis batubara yang dimiliki beragam kualitasnya, maka pola pemanfaatannya sesuai dengan karakteristiknya.

3. Skenario 3. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Skenario ini terdiri dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah calon investor, pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumberdaya energi yang mengedepankan kerja sama pemerintah dan investor, serta pengembangan regulasi yang mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi. Selain itu, juga perlu adanya kepastian hukum bagi investor dan pengusaha, serta promosi dan pengembangan bisnis pendukung dari produk energi.

4. Skenario 4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Kebijakan yang perlu ditempuh adalah peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran.

5. Skenario 5. Pengembangan sumberdaya manusia.

Kebijakan yang perlu ditempuh adalah penyiapan sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas untuk kegiatan industri energi dan penunjangnya.

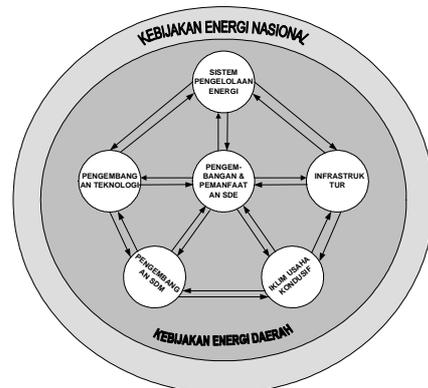
6. Skenario 6. Pengembangan teknologi

Kebijakan pengembangan teknologi diarahkan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan sumberdaya energi dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kemampuan dalam meningkatkan nilai keekonomian dan keunggulan produk energi, serta ramah lingkungan.

7. Skenario 7. Pengembangan kebijakan energi daerah

Kebijakan penyusunan payung hukum bagi pelaksanaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional. Kebijakan tersebut antara lain Kebijakan Energi Daerah (KED). Kebijakan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk Kebijakan Energi Nasional, *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional, dan perencanaan-perencanaan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan/atau benturan kebijakan antardaerah, misalkan provinsi dengan kabupaten/kota, atau antarkabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Ketujuh skenario kebijakan di atas saling mempunyai keterkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Gambar 2 menunjukkan alur hubungan, pengaruh dan interaksi antarketujuh skenario kebijakan tersebut.



**Gambar 2.** Alur Skenario Kebijakan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional

#### 4. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah :

- Melakukan sinkronisasi dan diseminasi kebijakan, baik antardaerah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) terkait, antarinstansi (*stakeholders*) terkait, antarsektor/subsektor terkait, dan antarprogram/kegiatan terkait.
- Membuat peraturan perundang-undangan tentang Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan yang lebih tinggi tingkat kedudukannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 2006. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 –2016*, Palembang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2005. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2005/2006*, Palembang.

Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. 2006. *Statistik Ekonomi Energi Indonesia 2006*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Universitas Sriwijaya. 2005–2006. *Master Plan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006-2025*, Palembang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.